



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022**

## **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Sesuai PP No 71 tahun 2010 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar**

**Ajeng Manjana<sup>1</sup>, Juliana Nasution<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[ajengmanjana01@gmail.com](mailto:ajengmanjana01@gmail.com)<sup>1</sup>, [juliananasution@gmail.com](mailto:juliananasution@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The Regional Financial Management Agency (BPKD) is an implementing agency or unit in assisting the government in financial management. The BPKD is responsible for preparing financial reports for the implementation of the APBD. The BPKD is formed so that in managing regional finances it is well organized so that standard operating procedures for revenue management can help improve accountability and regional financial performance. In Indonesia, the SAP that has been in effect until now is the accrual basis of government accounting standards which are then regulated in "PP Republic of Indonesia No. 71 of 2010 concerning government accounting standards". The purpose of this study is to identify and examine the use of the financial accounting system at the Regional Financial Management Agency (BPKD) Pematangsiantar City. The research method that the author uses in this research is descriptive qualitative method. Based on the results of the research that the Pematangsiantar City Regional Financial Management Agency in general has implemented an accounting system in accordance with "PP no. 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards in Local Governments".*

**Keywords:** Accounting System, Regional Finance, PP No 71 of 2010

### **ABSTRAK**

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan badan atau unit pelaksana dalam membantu pemerintah dalam pengelola keuangan. BPKD mempunyai tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan pelaksanaan APBD. BPKD di bentuk agar dalam mengelola keuangan daerah tertata dengan baik sehingga prosedur operasi standar pengelolaan pendapatan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah. Di Indonesia SAP yang berlaku hingga sekarang yaitu standar akuntansi pemerintah basis akrual yang kemudian diatur dalam "PP Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan sistem akuntansi keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil daripada penelitian bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar secara umum telah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan "PP No. 71 tahun 2010 mengenai standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah".

**Kata Kunci:** Sistem Akuntansi, Keuangan Daerah, PP No 71 Tahun 2010

## PENDAHULUAN

UU No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 mengenai Perebendaharaan Negara memerintahkan supaya pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual". Basis akrual adalah metode akuntansi di mana aktivitas keuangan atau peristiwa pembukuan diakui, didokumentasikan, dan ditampilkan dalam keuangan berdasarkan efeknya, dianggap sebagai beban yang diterima atau dibayar. Standar akuntansi yang di atur dalam "peraturan pemerintah No. 21 tahun 2005", Pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang didalamnya harus ada laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Untuk menghadapi ini, pihak pemerintah daerah memerlukan suatu sistem yang bisa menghasilkan suatu laporan keuangan yang lengkap dan juga informasi keuangan lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, posisi keuangan, dan kondisi daerah.

Sebagai pembaharuan dan penyempurnaan peraturan pemerintah yang ada, pemerintah menerbitkan "PP No. 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah". Dengan itu, Menteri Dalam Negeri sudah menyempurnakan "Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007" mengenai pedoman/pegangan dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yang mana pencatatan double entry telah digunakan oleh SAKD dengan sistem akuntansi berbasis kas yang kemudian dimodifikasi mengacu pada basis akrual, sebagaimana dimaksud "Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah". Dengan demikian, penggunaan SAKD diproyeksikan akan menghasilkan pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat, tepat, dan komprehensif atas transaksi keuangan yang terjadi di lingkungan organisasi (badan) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kualitas penilaian yang dibuat oleh konsumen atas laporan keuangan tersebut.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan badan atau unit pelaksana dalam membantu pemerintah dalam pengelola keuangan. BPKD mempunyai tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan pelaksanaan APBD. BPKD di bentuk agar dalam mengelola keuangan daerah tertata dengan baik sehingga prosedur operasi standar pengelolaan pendapatan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah.

Menurut hasil penelitian Rifa Aulia Suherman, dkk (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) dalam penyajian laporan keuangan pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan hanya pada saat menggunakan aplikasi SAKPA dalam menu LRA dan neraca. Sedangkan saat setelah menggunakan aplikasi SAIBA sudah dilengkapi dengan LPE dan LO. Menurut hasil penelitian Ardin (2018) menunjukkan bahwa laporan keuangan badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pulau Morotia secara lazim sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAS.

Berdasarkan dari fenomena yang sudah disampaikan diatas, masih adanya kantor publik yang belum menerapkan sistem akuntansi daerah yang berakibat pada penyajian laporan keuangan dan perlunya sisten akuntansi daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Masalah seperti ini harus segera diatasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Jika hal ini diatasi, niscaya akan menghasilkan lingkungan yang nyaman dan akomodatif di mana karyawan dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan benar dan optimal.

## KAJIAN LITERATUR

### *Sistem Akuntansi*

Sistem akuntansi yaitu pengorganisasian catatan, formulir, dan juga laporan sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan informasi keuangan kepada manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016). Menurut Yadiati, Winwin dan Wahyudi (2006) yang merupakan contoh input

dalam sistem akuntansi keuangan yaitu bukti memorial dan surat perintah membayar (SPM) yang melalui tahapan awal transaksi, kemudian jurnal, lalu memposting/memindahkan ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, setelah itu neraca saldo setelah penyesuaian, membuat laporan keuangan, dan sebagai akhir membuat jurnal penutup pada akun.

### ***Akuntansi Pemerintah***

Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah dalam pencatatan dan pengelolaannya agar bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Nuramalia dan Achmad (2017), secara umum akuntansi pemerintah yaitu kegiatan memberikan layanan untuk menawarkan informasi keuangan kepada pemerintah yang didasarkan atas pencatatan, kemudian pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan interpretasi transaksi keuangan.

### ***Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua (PP No. 71 Tahun 2010)***

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu standar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan akuntansi pemerintah pusat ataupun daerah.” (Dwi Martani, 2018). Dalam “PP No. 17 Tahun 2010 telah ditetapkan standar akuntansi pemerintah basis akrual”. SAP di Indonesia sekarang ini yaitu SAP basis akrual, sebagaimana didefinisikan dalam “PP Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan”. Pendapatan LO, aset, beban, ekuitas, dan utang diakui didalam SAP basis akrual dan pendapatan LRA, pembiayaan, dan belanja yang berkenaan dengan pelaporan dalam melaksanakan anggaran didasarkan penetapan basis oleh anggaran daerah/negara juga diakui.

### ***Karakteristik Akuntansi Pemerintah***

Berdasarkan “PP No.71 tahun 2010” akuntansi pemerintahan mempunyai karakteristik yaitu jumlah pernyataan standar, basis akuntansi, laporan keuangan, dan informasi keuangan. Berikut ini adalah perbedaan antara karakteristik akuntansi pemerintah dan akuntansi perusahaan:

- a. Tidak ada keuntungan dalam akuntansi pemerintah.
- b. Ketika anggaran dicatat, pemerintah mencatatnya.
- c. Lebih dari satu bentuk dana dapat digunakan dalam akuntansi pemerintah.
- d. Pengeluaran modal dalam akuntansi pemerintah akan dicatat dalam neraca yang diantisipasi dan juga hasil operasi.
- e. Karena sangat bergantung pada undang-undang dan peraturan, akuntansi pemerintah sangat ketat.
- f. Neraca dalam akuntansi pemerintah tidak termasuk estimasi modal atau laba ditahan. (Nuramalia, Achmad, 2017)

### ***Tujuan Akuntansi Pemerintah***

Pemerintah merupakan kategori organisasi sektor publik. Tujuan hakiki dari organisasi sektor publik yaitu layanan kepada masyarakat. Akan tetapi ada organisasi yang juga dikategorikan sektor publik juga berorientasi pada laba. Pada dasarnya akuntansi pemerintah mempunyai tujuan khusus yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan.

### ***Unsur Laporan Keuangan Pemerintah***

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari item berikut, sesuai “peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010” :

- a. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang memberikan gambaran umum mengenai sumber daya pemerintah, alokasi, dan pemakaian sumber daya dari waktu ke waktu. Kepatuhan pemerintah terhadap APBN/APBD negara tercermin didalam laporan realisasi anggaran. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran disusun melalui entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yaitu laporan yang menunjukkan bagaimana anggaran telah berubah dan berapa banyak uang yang tersisa pada akhir periode tertentu. Saldo anggaran lebih yaitu tunggakan saldo yang asal nya dari SILPA/SIKPA terakumulasi pada anggaran di tahun-tahun yang lalu dan tahun-tahun yang akan berjalan, dan juga menyertakan kewajiban-kewajiban yang diperbolehkan.

- c. Laporan Operasional adalah laporan kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah didalam suatu periode. Laporan operasional disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- d. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menggambarkan apakah ekuitas meningkat/menurun pada tahun pelaporan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Perusahaan bagian akuntansi dan pelaporan menyiapkan laporan perubahan ekuitas.
- e. Neraca adalah laporan yang mengilustrasikan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas di tanggal tertentu.
- f. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi kas atas operasi, investasi, pembiayaan, dan operasi sementara yang menggambarkan saldo awal pemerintah pusat/daerah, pendapatan, pengeluaran, dan saldo kas akhir selama periode tertentu.
- g. Catatan atas laporan keuangan yaitu semua yang memiliki penjelasan naratif/spesifik dari statistik yang tercantum dalam LRA, LO, LPE, Neraca, dan LAK.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Proses penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan strategi untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang hal yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah diperoleh dalam keadaan alami, tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang diterima secara luas (Sugiyono, 2013)

### ***Lokasi Penelitian***

Proses penelitian ini di lakukan pada kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. Yang beralamat di jalan Merdeka No. 8 Pematangsiantar.

### ***Sumber Data***

Informasi dalam penelitian ini didasarkan pada sumber primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari suatu sumber selama wawancara dan memerlukan pemrosesan tambahan oleh penulis. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung, wawancara serta dokumentasi.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu melalui penelitian pustaka (library research) dan juga penelitian lapangan (field research). Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data teoritis yang sumbernya dari buku-buku, media penulisan ilmiah dan literatur. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara.

### ***Metode Analisis Data***

Metode deskriptif kualitatif di gunakan dalam penelitian ini. Dalam metode kualitatif deskriptif data banyak di peroleh melalui observasi dan wawancara. Metode ini diawali dengan mengumpulkan data lalu menyaring data dari hasil perolehan secara lengkap dan juga detail, data yang terkumpul selanjutnya direduksi dengan tujuan untuk menemukan data-data yang dianggap relevan. Cara mengevaluasinya yaitu membandingkan dengan penerapan di lapangan dengan yang ada di "PP No. 71 Tahun 2010".

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kebijakan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BPKD***

SAP baru adalah SAP berbasis akrual, yang diatur dalam "Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010" mengenai standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan basis akrual ini dirasa sangat mempermudah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Akuntansi "sekarang kita sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual tentunya ini sangat membantu dan juga mempermudah karna sudah jelas dia mana yang akan dimasukkan kedalam neraca". Penulis menyimpulkan bahwa, berdasarkan wawancara yang disebutkan diatas, akuntansi berbasis akrual dalam penerapannya sangat membantu dan juga mempermudah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah.

**Tahap Penyusunan SAPD**

Untuk menyusun SAPD, perlu memperhatikan beberapa tahap yaitu

**a. Identifikasi Prosedur**

Tahap pertama yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam proses penyusunan sistem akuntansi adalah memahami mengenai proses bisnis dalam pemerintah daerah terkhusus mengenai pengelolaan/manajemen keuangan daerah. SOP atau “Standar Operasional dan Prosedur” yaitu dokumen yang ada kaitan langsung dengan prosedur yang akan dilakukan dengan cara berurutan guna menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil kerja yang paling efisien dari para pekerja dengan biaya minimum.

**b. Menentukan/memilih pihak-pihak yang terlibat/terkait**

Selesai mengidentifikasi prosedur-prosedur, maka pada masing-masing prosedur harus ditentukan pihak-pihak terkait yang mempunyai tugas tersendiri agar nantinya prosedur tersebut diharapkan akan menghasilkan output yang diinginkan. Dalam BPKD Kota Pematangsiantar telah memiliki struktur organisasi dan telah melakukan pemisahan fungsi secara khusus, setiap peran menghasilkan serangkaian tanggung jawab dan tugasnya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa pada dinas BPKD Kota Pematangsiantar sudah melakukan pemisahan fungsi secara khusus, dan juga dilengkapi dengan tugas masing-masing. Dalam kaitannya ini sejalan dengan “PP No. 71 tahun 2010”.

**c. Menentukan Dokumen terkait**

Semua dokumen yang terkait akan dipilih untuk menentukan dokumen mana yang valid. Pada BPKD Kota Pematangsiantar setiap transaksi sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan “PP No. 71 tahun 2010”.

d. Pencatatan BPKD Kota Pematangsiantar dalam pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Sistem ini sudah memenuhi “PP No. 71 tahun 2010”.

**Metode Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada BPKD****a. Proses Pencatatan Akuntansi BPKD**

Proses Pencatatan Akuntansi pada BPKD diawali dengan pengelolaan barang daerah yang dibuktikan dengan bukti transaksi, dari bukti tersebut lalu dibuatkan bukti memorial setelahnya dilakukan penjumlahan. Berikut ini adalah proses pencatatan pada BPKD

• **Transaksi**

“Pemendagri No. 64 Tahun 2013 mengenai penerapan SAP berbasis akrual”, yang menyatakan jika seluruh transaksi harus langsung dicatat meskipun kas belum diterima. Pada BPKD Kota Pematangsiantar seluruh pencatatan sudah sesuai dengan pemendagri yang berlaku. Maka dengan ini BPKD Kota Pematangsiantar telah sepenuhnya menerapkan akuntansi basis akrual sesuai “PP No. 71 Tahun 2010”.

• **Jurnal**

Pencatatan transaksi sampai penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh unit pemerintahan yang bertanggung jawab dibidangnya. Jika transaksi sudah sesuai dengan dokumen, maka dicatat oleh PPK-SKPD. Pada BPKD Kota Pematangsiantar dimulai pencatatan transaksi hingga menyusun laporan keuangan telah dilakukan penjumlahan, dan dalam kaitannya telah memenuhi “PP No. 71 tahun 2010”.

• **Buku Besar**

Langkah selanjutnya adalah menyerahkan transaksi ke buku besar setelah dicatat di jurnal. PPK-SKPD saat ini memindahkan kegiatan kedalam buku besar berdasarkan nominal buku besar yang terkait oleh masing-masing akun. Tahap ini telah dilakukan oleh BPKD Kota Pematangsiantar

• **Neraca Saldo**

Di akhir periode akuntansi, BPKD Kota Pematangsiantar menyusun neraca saldo.

• **Laporan Keuangan**

Dalam “PP No.71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah” ada 7 laporan keuangan wajib, semua telah di buat oleh SKPD, laporan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan BPKD Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan “PP No. 71 tahun 2010”.

Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan “SAP Nomor 71 Tahun 2010”, penulis telah melakukan penelitian langsung ke kantor BPKD dan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara BPKD Kota Pematangsiantar sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan “PP RI No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Berbasis Akrua”. BPKD Kota Pematangsiantar menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Penetapan SAP basis akrual membantu dan mempermudah staf dalam pekerjaannya.

Sistem pencatatan pada BPKD Kota Pematangsiantar diawali dari transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, Saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan CaLK berdasarkan hasil penelitian bahwa BPKD telah menerapkan “PP No. 71 tahun 2010”.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini, yaitu :

- a. Dalam sistem penyusunan laporan keuangan pada BPKD Kota Pematangsiantar menggunakan aplikasi SIPD yang memudahkan jika harus menyiapkan laporan keuangan.
- b. BPKD Kota Pematangsiantar sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan “PP No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi basis akrual juga Pemendagri No. 64 tahun 2013 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual oleh Pemerintah Daerah”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Febransyah, & Astari, D. (2021). *Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Pada Kantor Camat Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir*. 2(2), 26–30.
- Imani, Annisa Nurul, Diana, Nur, Mawardi, M. C. (2021). Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dibadan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Kapa, S. P., Ismail, N., & Tey, F. N. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan Psap Pada Bkd Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 1–9.
- Septariani, J. (2019). Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2(1), 32.
- Suherman, R. A. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, 1–16.
- Sutrisna, I. P. A., Indraswarawati, S. A. P. A., & Putra, C. G. B. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Moderasi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 637–664.
- Umar, A., Hasan, J., Katiandagho, S., & Studi. (2021). Evaluasi Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Laporan Keuangan Bawaslu Kab. Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 62–74.
- Vezalin, F., Sartika, D., & Ilyas, A. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Padang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 165–177.